



PERAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PENGEMBANGAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN SAAT PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG 1945

Muhamad Hijran¹, Dini Oktariani²

¹Program Studi Ekonomi, Universitas Bangka Belitung

²Program Studi Manajemen, Universitas Bangka Belitung

Info Artikel

Sejarah Artikel:

diterima : 26 Oktober 2021

direvisi : 9 November 2021

disetujui : 11 November 2021

Abstract

This research study aims to determine the Strategy for the development of a People's Economy (Economic Civic) and is very relevant to do considering that the People's Economy is businesses in the economic field, where the main achievement target is not financial gain. This study uses qualitative research methods, namely collecting data from scientific articles, research reports or other matters relevant to the topic. The results of the study conclude that UMKM in the role of the populist economy in the Province of the Bangka Belitung Islands through entrepreneurial programs, business unit development, improving the quality of human resources, and utilizing technology and information so that they can have a positive impact on increasing products.

Kata-kata Kunci:

*Sistem Ekonomi Kerakyatan,
Kebijakan Hukum,
Kesejahteraan*

Abstrak

Kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi pengembangan Ekonomi kerakyatan (*Economic Civic*) dan sangat relevan dilakukan mengingat Ekonomi Kerakyatan merupakan usaha-usaha di bidang ekonomi, dimana target pencapaian utamanya bukanlah keuntungan finansial semata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni mengumpulkan data-data dari artikel ilmiah, laporan penelitian atau hal-hal yang relevan dengan topik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan pendapatan melalui program *entrepreneur*, pengembangan unit usaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi dan informasi sehingga bisa memberikan dampak positif pada peningkatan penjualan produk.

Cara mengutip :

Hijran, M., Oktariani, D. (2021). Peran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan saat Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang 1945. *Jurnal PROFIT: Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 8(2), 95-101. <https://doi.org/10.36706/jp.v8i2.15672>

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 di Indonesia terjadi pertama kali pada Tanggal 2 Maret 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jawa Timur, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi paling terpapar. Upaya pencegahan penyebarannya dilakukan dan dikampanyekan oleh berbagai bidang pemerintah dan tenaga kesehatan. Setidaknya ada dua cara yang menjadi kunci pengendalian penularan dan penyebaran Covid-19 yaitu dengan cara menjaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan memperbanyak wastafel portable yang diadakan secara mandiri oleh masyarakat. Pemerintahpun akhirnya melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta mengkampanyekan *Stay at home*.

Sektor UMKM pun terdampak parah. Berdasarkan data dari kementerian koperasi yang memaparkan bahwa sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona (Antara, Mei 2020). Sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi COVID-19. Para pengusaha UMKM merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sedikitnya 39,9 persen UMKM memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat Covid-19. Sementara itu 16,1 persen UMKM memilih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup. Sektor UMKM mengalami dampak yang cukup dalam akibat pandemi Covid-19. Dampak yang signifikanpun terjadi terhadap perekonomian di Indonesia. Dari semua usaha mikro kecil hingga koperasi sangat terdampak dengan adanya wabah virus corona. Penjualan menurun, permodalan, pesanan menurun, kesulitan bahan baku, dan kredit macet. Ekonomi tiba-tiba ambruk dalam sekejap.

Bersarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil menengah, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang sesuai dengan kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dengan jumlah kekayaan atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang_undang.Selain itu pula Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 merupakan payung hukum dalam pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan.

Secara historis konsep ekonomi kerakyatan merupakan gagasan di bidang ekonomi yang dikembangkan oleh Soekarno dan Hatta pada tahun 1930-an. Soekarno menggunakan istilah ekoomi rakyat yang berhadapan dengan sistem ekonomi monopoli. Penelitian Sri Edi Swansono (2014: 89) mengemukakan bahwa pendapat Mohamad hatta tentang ekonomi kerakyatan menggunakan istilah perekonomian ra'jat dan ekonomi ra'jat merujuk pada pemahaman tentang *grass-rootseconomy* atau ekonomi berbasis rakyat (*people-based economy*) dan ekonomi terpusat pada kepentingan rakyat (*people-centered economy*). Pemikiran Mohammad Hatta tersebut dijabarkan dalam beberapa tulisan yang dimuat pada harian Daulat Ra'jat: "Pengaroh Kolonial kapital di Indonesia" yang dimuat pada 20 November 1932; "Pendirian Kita" dimuat tanggal 10 September 1932; "Krisis Dunia dan Nasib Ra'jat Indonesia" dimuat tanggal 20 September 1932 dan yang paling monumental adalah tulisannya 10 juni 1934 yang berjudul "Ekonomi Ra'jat dalam Bahaya". Latar belakang tulisan-tulisan Mohammad hatta pada era 1932 sampai dengan tahun 1934 diatas di dorong keprihatinan beliau dengan politik yang diterapkan Belanda, dimana kebijakan perekonomian tidak berpusat pada kepentingan rakyat dimaksud.

Pembangunan ekonomi di Indonesia landasan pemikirannya terkandung pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Makna secara Holistik menyatakan bahwa peran Negara dalam menjamin segala apa yang terkandung pada bumi Indonesia harus dikuasai negara dan diperuntukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut Sabil (2014: 51) Besar kecilnya perekonomian rakyat tergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi atau nominal produk domestik bruto (PDB). Berbagai cabang Produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasi oleh negara sebagai modal usaha mencapai kemakmuran rakyat. Untuk mencapai kemakmuran tersebut, hadir pandangan mengenai ekonomi kerakyatan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hasmawati (2018: 54) menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah kegiatan yang

memberikan kesempatan partisipasi yang luas kepada masyarakat untuk pelaksanaan dan pengembangan yang baik. Sehingga memenuhi syarat khususnya untuk mewujudkan Sila Ke 5 (lima), “Keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat”.

Konsep ekonomi kerakyatan ini sebagai salah satu bentuk usaha untuk menumbuhkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut diperlukan sinergi antara pemerintahan pusat maupun daerah. Menurut Wibawa dan Yusnita (2018:2) peneliti sependapat bahwa pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah pada dasarnya menitikberatkan pada penguatan kemampuan lembaga ekonomi kerakyatan seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menciptakan sentra pengembangan produk unggulan daerah berbasis budaya dan potensi daerah. Oleh sebab itu, diperlukannya memberdayakan potensi UMKM yang secara berkelanjutan, ideal, dan tentunya inklusif. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM per April 2021, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada.

Di Indonesia pandemi Covid-19 berdampak terhadap beberapa sektor, tidak terkecuali sektor ekonomi. Sehingga menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi lemah dikarenakan beberapa usaha gulung tikar. Dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai data Badan Pusat Statistik triwulan I-2021 tumbuh 0,97% persen, mengalami perlambatan bila dibandingkan triwulan I-2020 (y-on-y) yang tumbuh sebesar 1,36. Melemahnya perekonomian ini, menyebabkan UMKM mengalami resesi sehingga diharapkan segera bangkit dari keterpurukan karena peran vitalnya UMKM dalam roda perekonomian daerah, bahkan maupun nasional. Peneliti sependapat dengan Halim (2020: 158) bahwa Peran UMKM memiliki makna yang sangat penting untuk daerah, khususnya sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian khusus untuk para pelaku UMKM. Seperti apa yang di uatarakan oleh Helmalia dan Afrinawati (2018: 237) bahwa UMKM bisa menjadi prioritas dari sistem ekonomi kerakyatan untuk menanggulangi permasalahan seperti kemiskinan dan pengangguran.

Nilai ekonomi dari satu produk UMKM diperlukannya inovasi dan kreativitas bukan hanya mengandalkan harga saja. Menurut Sumarni (2017: 139) Untuk meningkatkan Kemampuan UMKM di Indonesia agar produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar global yang harus ditempuh pemerintah yaitu dengan cara meningkatkan neraca perdagangannya. Di era New Normal di masa Pandemi Covid-19 dan teknologi yang semakin maju, Produk UMKM harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga nantinya bisa bersaing baik didalam negeri dan luar negeri. Tetapi kenyataan dilapangan, banyak sekali kendala yang harus dibenahi. Penelitian Thaha (2020: 149) melaporkan bahwa 163.713 pelaku UMKM pada sektor makanan dan minuman terkena dampak pandemi Covid-19. Disinilah perlunya keharmonisan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta para pelaku UMKM untuk menanggulangi permasalahan yang ada sehingga bisa teratasi dengan baik. Penelitian Hardilawati (2020: 97) menunjukkan strategi bertahan UMKM di tengah Pandemi Covid-19 yang meliputi rekomendasi untuk melakukan perdagangan secara *e-commerce*, melakukan pemasaran secara digital, perbaikan kualitas produk, penambahan pelayanan konsumen, dan optimalisasi hubungan pemasaran pelanggan.

Hasil penelitian diatas telah menjelaskan bahwa dampak dari pandemi Covid-19 untuk para pelaku UMKM ini diperlukanya Pendampingan dalam strategi menghadapi pandemi Covid-19. Penelitian Andayani et al (2021 : 13) menjelaskan dalam menjalankan Strategi pelaku UMKM dalam menghadapi Covid-19 dapat dilakukan melalui pemasaran produk secara online sehingga menghasilkan penghematan pada sektor produksi, distribusi dan pemasaran konvensional. Disinilah diperlukannya kreativitas dari pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi. Sejalan dengan Pendapatnya Sutinah et al (2020 : 206) Para pelaku UMKM di dorong untuk belajar memahami tentang karakteristik pelaku konsumen ke arah pasar digital dengan memasarkan produk UMKM melalui teknologi digital. Inilah urgensi penjualan produk UMKM sangat diperlukan dengan memanfaatkan marketing digital yang berdampak positif sehingga UMKM dapat tetap berjalan dan menghasilkan nilai ekonomi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan saat pandemi Covid-19. Peneliti berasumsi bahwa penelitian tersebut belum pernah dilakukan dengan kebermanfaatn hasil penelitian bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Literature review*. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil peneliti. Kumpulan data Studi Literatur yang terdiri dari artikel jurnal, textbook, handbook, arsip maupun regulasi adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Pengumpulan *Literature review* digunakan beberapa tahapan diantaranya pencarian artikel berdasarkan topik garis besar, pengelompokkan artikel berdasarkan relevansi dengan topik.

Setelah artikel terkumpul selanjutnya peneliti mengelompokkan sejumlah artikel yang telah didapatkan berdasarkan relevansi topik. kemudian artikel yang dikelompokkan peneliti analisis penjelasan struktur mengenai ketertarikan artikel dan topik peneliti. Lalu penulis membandingkan apabila ada jurnal saling berhubungan dan penambahan *textbook* lain bersifat memperkuat dan menambah ketajaman pembahasan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

UMKM yang terdampak COVID-19

Begitu cepatnya penyebaran Covid-19, dampak perlambatan perekonomian secara global mulai dirasakan oleh Indonesia. Banyak pelaku UMKM tidak segan-segan untuk meliburkan sampai ada yang mengeluarkan karyawannya bahkan tidak sedikit yang menutup sementara usahanya. Salah satu penyebabnya adalah penurunan omzet penjualan. *Work Form Home* atau dikenal dengan singkatan WFH juga berpengaruh terhadap penurunan pendapatan UMKM. Pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan yang drastis akibat penerapan *Phisical Distancing* dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pembatasan aktifitas masyarakat sangat berpengaruh pada aktifitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian di Indonesia. Para pelanggan menutup diri bahkan menjaga jarak untuk saling bertemu dengan masyarakat dan berdampak pada aktifitas bisnis yang mengakibatkan ekonomi menjadi turun.

Kegiatan interaksi fisik antara sesama warga masyarakat menjadi berkurang dan membuat masyarakat mengurangi aktifitas ekonomi secara drastis. Hal ini sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor perekonomian, salah satunya yaitu UMKM. Penelitian Rosita (2020) Keadaan ini sangat mengkhawatirkan mengingat pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat berpengaruh dan sangat tergantung pada ketahanan UMKM saat menghadapi krisis. Dengan adanya pandemi seperti ini, tidak membuat perekonomian daerah menurun, bahkan seluruh daerah di Indonesia merasakan hal yang sama tidak terkecuali di Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami kerugian bahkan ada yang mengalami penurunan omzet penjualan karena adanya pandemi Covid-19. Penelitian Soetjipto (2020 : 97) melaporkan bahwa penyebab penurunan omzet pelaku UMKM, yaitu 63% disebabkan oleh daya beli konsumen menurun, 46% konsumen takut membeli disertai adanya aturan PSBB, dan 42% adanya aturan jam operasional toko. Dampak dari penurunan omzet, 33% pelaku UMKM memilih menghentikan produksi, 19% menghabiskan stok barang yang dikembalikan, 8% melakukan produksi ketika ada pesanan, dan 27% membuka dagangan dengan protokol kesehatan yang ketat. Usaha Pelaku UMKM dalam menyiasati situasi pandemi, yaitu 38% melakukan pemasaran melalui media sosial, 35% menggunakan promosi berbayar yang telah tersedia secara online, 13% menitipkan produk secara konvensional dan 6% tetap membuka tempat jualan. Disinilah diperlukannya perhatian dari berbagai stekholder dalam membatu para pelaku UMKM, untuk berkolaborasi sehingga bisa tetap bisa bertahan dalam masa pandemi.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri memiliki peran untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan beberapa program. Salah satunya dilihat dari data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah Tahun 2020 yaitu program peningkatan pemberdayaan usaha kecil. Keluaran kegiatan ini adalah 100 produk UKM di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka tengah, Bangka selatan, dan Bangka Barat yang di fasilitasi dalam pameran virtual di Kabupaten Bangka tepatnya di Pantai Tiung Kecamatan Belinyu dan 60 Produk UKM di kabupaten Belitung dan Belitung Timur yang di fasilitasi dalam pameran virtual di kabupaten Belitung. Selain itu pula terfasilitasinya 500 Produk UKM melalui Market Place di Bukalapak dan 200 Produk UKM di Market Place Bli-Bli. Sejalan dengan Penelitian Hardilawati (2020) menjelaskan bahwa strategi untuk bertahan di tengah Pandemi Covid-19 untuk para pelaku UMKM yaitu rekomendasi dengan melakukan perdagangan secara *e-commerce*, melakukan pemasaran secara digital, perbaikan kualitas produk, penambahan pelayanan konsumen, dan optimalisasi hubungan pemasaran pelanggan. Sementara itu Fadlillah (2020: 344) menjelaskan bahwa pelaku UMKM bangkalan yang memiliki usaha minuman Boba mengalami penurunan omzet penjualan, sehingga menuntut pelaku usaha tersebut melek teknologi untuk dapat melakukan strategi pemasaran.

Program Selanjutnya yaitu Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil. Keluaran kegiatan ini adalah terpasilitasinya 200 pelaku usaha melalui sertifikasi halal, dan terlaksananya pendataan UMKM di 47 Kecamatan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan dalam 1 (satu) dokumen pendataan. Selain itu pula penyelenggaraan pelatihan perkoperasian dan UKM (DAK) di ikuti oleh 21 orang yang mengikuti pelatihan tata dan prosedur ekspor bagi pengurus dan anggota koperasi (pelatihan daring), 44 pelaku usaha yang mengikuti pelatihan kewirausahaan bidang UKM Ekspor, 428 pelaku usaha yang mengikuti pelatihan pengelolaan bisnis saat pandemi covid-19, 29 pelaku usaha yang mengikuti pelatihan kewirausahaan bidang keterampilan teknis pengolahan hasil perikanan dan 23 orang yang mengikuti pelatihan sertifikasi dan uji kompetensi juru buku. Penelitian Elfizon et al (2020: 237) mengungkapkan bahwa penerapan pemasaran produk melalui *e-commerce* berdampak positif terhadap pelaku industri rumah tangga. Aplikasi yang dapat digunakan pelaku UMKM dalam menjual pemasaran produknya bisa meliputi *Bukalapak*, *Lazada*, *Shopee*, *Tokopedia*, dan lain-lain.

Sementara itu untuk penggunaan digital marketing bisa memanfaatkan media sosial, seperti *Tiktok*, *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* dan *Whatsapp* sehingga bisa memberikan dampak positif pada peningkatan penjualan produk. Penggunaan media sosial merupakan sarana promosi bagi konsumen, sehingga diharapkan dengan adanya media sosial akan meningkatkan penjualan produk bagi perusahaan. Media sosial sendiri merupakan sudah menjadi trend dalam komunikasi pemasaran untuk sekarang ini. Penelitian Narto (2020: 53) Menunjukkan bahwa strategi pemasaran produk di tengah pandemi Covid-19 dilakukan melalui berbasis *Online* dengan mempertahankan harga produk dan meningkatkan kualitas untuk memperoleh loyalis Konsumen.

Pembahasan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk salah satu provinsi yang memiliki potensi yang sangat besar. Salah satunya pertumbuhan UMKM menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dimana ini merupakan kemajuan bagi perekonomian. Disatu sisi, ada permasalahan para pelaku UMKM yang sangat kompleks, seperti yang di ungkapkan oleh Herawati *et al* (2020:17) potensi dan permasalahan UMKN yang meliputi: UMKM belum memiliki jaringan pemasaran, modal dari kemampuan pribadi, berjalan mandiri tanpa dukungan dinas terkait, sarana produksi masih manual, banyaknya pesaing usaha dengan produk yang sama, situasi pandemi wabah penyakit, dan globalisasi pasar. Penelitian Fauziyah (2020:157) menjelaskan bahwa munculnya era digitalisasi akan memberikan dampak perkembangan dan pertumbuhan bagi UMKM Pemerintah daerah sendiri, melakukan upaya dan usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah memberikan bantuan pemodal, pengemasan dan pemasaran. Melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki beberapa program untuk peningkatan pemberdayaan usaha kecil, selain itu ada pelatihan pelayanan teknis latihan perkoperasian, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Para pelaku UMKM sendiri mengikuti beberapa program pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan berbagai macam kegiatan. Salah satunya mengadakan pelatihan untuk pelaku UMKM dengan bertujuan untuk mendorong kompetensi wirausaha sehingga menimbulkan kreatifitas dan kemampuan dalam

mencapai kesuksesan bisnisnya. Salah satu programnya peningkatan pusat layanan usaha terpadu UMKM dengan 150 pelaku usaha yang didampingi melalui klinik usaha terpadu dan pengembangan sentra usaha kepada 3 kelompok yaitu salah satu contohnya Bimtek peningkatan produktifitas dan daya saing kerajinan tangan daun Mengkuang di Desa Delas. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi dalam membangkitkan kinerja pelaku UMKM adalah kebijakan pemerintah daerahnya. Beberapa indikator kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM adalah salah satunya kebijakan fasilitas permodalan. Mengutip pernyataan dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman telah melakukan berbagai strategi untuk membuat UMKM tetap bertahan dan bangkit terutama di masa pandemi ini. Oleh karenanya, beliau berupaya mendorong sistem ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Dengan adanya Pemodal dan Pelatihan untuk para pelaku UMKM dari hasil koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mempunyai produk yang bersaing dalam negeri dan berorientasi ekspor sehingga menjadi penggerak perekonomian dan pemerataan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Realisasi KUR di Bangka Belitung Khusus untuk UMKM sampai sekarang ini di manfaatkan oleh hampir 20.000 pelaku UMKM. Capaian ini merupakan komitmen dan semangat lembaga perbankan dan perusahaan dalam hal ini BUMN, yang membantu fasilitasi akses permodalan.

Selain itu pula yang harus diperhatikan adalah bagaimana upaya untuk mendampingi atau membina para pelaku UMKM agar dapat melaksanakan usahanya dengan baik. Dengan pendampingan terus-menerus akan memberikan semangat kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan kembali UMKM ini diantaranya pemasaran digitalisasi, memfasilitasi UMKM untuk melakukan penjualan pada market place baik secara nasional maupun internasional dan promosi melalui media elektronik dan media online serta melakukan pameran virtual guna memperkenalkan produk unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, mendorong UMKM untuk meningkatkan daya saing melalui fasilitasi halal, fasilitasi kemasan produk, bantuan alat pendukung produksi, mendekatkan pada akses pembiayaan serta menajalin kemitraan dengan lembaga lainnya untuk bersinergi dalam pengembangan UMKM. Selain itu pula melakukan pelatihan produktivitas untuk membuat kerajinan yang diorientasikan untuk kebutuhan lokal, nasional dan ekspor.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa Peran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan saat pandemi covid-19 yaitu mengadakan beberapa program dengan membutuhkan strategi pemasaran dalam perekonomiannya. Sehingga tujuan dari ekonomi kerakyatan bisa berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan dari Alenia ke IV Pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan kolaborasi dan pendampingan secara berkala antar berbagai pelaku kepentingan. Beberapa programnya, yaitu program peningkatan pemberdayaan usaha kecil, Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil serta penyelenggaraan pelatihan perkoperasian dan UKM (DAK). Sehingga dengan adanya beberapa program dengan jejaring pemasaran digital diharapkan mampu meningkatkan pendapatan para pelaku ekonomi di Kepulauan Provinsi Bangka Belitung sehingga meningkat dan ekonomi kerakyatan bisa berjalan dengan maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Tim yang sudah memberikan dukungan sehingga artikel ini bisa selesai tepat waktu,

DAFTAR PUSTAKA

Andayani, Indah.; Roesminingsih, Maria Veronika; Yulianingsih, Wiwin. (2021) *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Pendidikan Nonformal. Vol. 16 (1)
DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um041v16i1p12-20>

- Elfizon, Ganefri, dan Asrul Huda. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemasaran Produk Industri Rumah Tangga melalui Penerapan E-Commerce di Kenagarian Vii koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten 50 kota*. Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional. Vol. 6 (2) <https://doi.org/10.24036/jtev.v6i2.109134>
- Fadlillah Syaiful, F., & Elihami, E. (2020). *PENERAPAN ANALISIS SWOT TERHADAP STRATEGI PEMASARAN USAHA MINUMAN KAMSIA BOBA MILIK ABDULLAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANGKALAN*. Jurnal Edukasi Nonformal, 1(1), 343-359. <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/583>
- Fauziyah. (2020). *Tantangan UMKM dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 ditinjau dari Aspek Marketing dan Accounting*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol. 5 (2) 155-172 <https://doi.org/10.32503/jmk.v5i2.1008>
- Halim, Abdul. (2020). *Pengaruh Pertumbuhan usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan. Vol. 1 (2) 157-172 <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39/30>
- Hardilawati, Wan Lauran. (2020). *Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*. Jurnal Akuntansi & Ekonomika. Vol. 10 (1) 89-98 <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>
- Hasmawati, Fifi (2018). *Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. Vol. V (5) 54-65 <http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v6i1.4986>
- Helmalia & Afrinawati. (2018). *Pengaruh E-Comerce Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padang*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 3 (2) 237-246 <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.182>
- Herawati, L, Dayal Gustopo & Prima Vitasari, (2020). *Identifikasi Permasalahan Penjualan dengan Metode SWOT pada UKM Gula Merah*. Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri. Vol. 6 (1) 17-20 <https://doi.org/10.36040/jtmi.v6i1.2625>
- Narto & Gatot Basuki HM. (2020). *Penguatan Strategi Pemasaran Puduk di tengah Pandemi Covid-19 untuk meningkatkan Keunggulan Bersaing Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Gresik*. Jurnal Intech. Vol. 6 (1) 48-54 <http://dx.doi.org/10.30656/intech.v6i1.2195>
- Rosita, Rahmi. (2020). *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia*. Jurnal Lentera Bisnis. Vol. (9) No 2 109-110 doi : 10.34127/jrlab.v9i2.380
- Sabil. (2014). *Sistem Ekonomi Kerakyatan sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui UKM, Koperasi dan Pemerintah Daerah*. Jurnal Moneter. Vol. I (1) 51-57 <https://doi.org/10.31294/moneter.v1i1.938>
- Soetjipto, Noer. (2020). *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: K-Media
- Sumarni. (2017). *Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Manajemen FE-UB. Vol. 005 (1) 138-145 <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/manajemen/article/view/438/435>
- Sutinah, Bagong suyanto, dan Ratna Azis P. (2020). *Pemberdayaan Pelaku UMKM Merespon Pergeseran Karakteristik Konsumen di Era Digital*. Jurnal Layanan Masyarakat. Vol. 4 (1) 202-207 <http://dx.doi.org/10.20473/jlm.v4i1.2020.202-207>
- Swasono Sri Edi, (2014) *Kebangsaan, Kerakyatan, dan Kebudayaan dalam “Prosiding Kongres Pancasila VI:Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa”*, Ambon, 31 Mei - 01 Juni 2014, hlm. 89.
- Thaha, Abdurahman Firdaus. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia*. Jurnal Brand. Vol. 2 (1) 147-153 <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>
- Wibawa, Dian & Yusnita, M. (2019). *Peran UMKM sebagai Penyangga Perekonomian Berbasis Kerakyatan*. Holistic Journal of Management Research. Vol. 4 (2) 1-9 <https://journal.ubb.ac.id/index.php/holistic/article/view/1430>